

# Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah

Shalma Asfarina <sup>1\*</sup>, Ivan Yudianto <sup>2</sup>, Annisa Nabila Hasan <sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\* [shalma21001@mail.unpad.ac.id](mailto:shalma21001@mail.unpad.ac.id)

## Abstrak

Urgensi penelitian adalah akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah Yng merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab di pemerintah Kota Bandung. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah secara efektif, efisien, serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan BPK di pemerintah Kota Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, data dikumpulkan dari 62 responden di 31 organisasi aparatur daerah sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *sensus sampling*. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan *regresi linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BPK, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh positif. Model tersebut menjelaskan 37% variasi dalam akuntabilitas, menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar model juga memengaruhi akuntabilitas pengelolaan BPK.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, Komitmen Kepemimpinan, Pengelolaan Barang.*

## Pendahuluan

Barang milik daerah (BMD) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik di daerah. Pengelolaan BMD perlu dilakukan secara tertib dan selaras dengan prinsip fungsionalitas, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta kejelasan nilai aset (Lestariningsih, 2024). Secara regulatif, BMD didefinisikan sebagai seluruh aset yang diperoleh dari APBD maupun sumber lain yang sah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan menegaskan bahwa pencatatan, penilaian, dan pelaporan aset harus dilakukan secara tepat dalam laporan keuangan pemerintah (PSAP Nomor 01), sehingga aset tidak hanya dipandang sebagai angka neraca, tetapi sumber daya yang harus dijaga keberlanjutannya.

Akuntabilitas pada umumnya juga menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan melekat pada kewajiban kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan secara akuntabel, termasuk pada pengelolaan aset daerah. Namun, pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti pencatatan yang belum akurat, aset tidak termanfaatkan, hingga ketidakjelasan status kepemilikan yang berpotensi menimbulkan

kerugian dan menurunkan kepercayaan publik. Kondisi ini sejalan dengan teori agensi, yang menekankan kewajiban pemerintah sebagai *agent* untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sebagai *principal* (Lauma et al., 2016). Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di Kota Bandung, permasalahan tersebut tercermin dari LHP BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2024 yang masih menemukan kelemahan pengendalian *intern* dan kepatuhan terkait pengelolaan serta penatausahaan aset, sehingga direkomendasikan penguatan pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan oleh pihak terkait.

Demi mewujudkan akuntabilitas tersebut, kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan BMD. Pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam memahami regulasi, prosedur, dan teknis penatausahaan aset sangat berperan dalam terciptanya pengelolaan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM di lingkungan pemerintahan dapat berdampak positif terhadap ketertiban administrasi pengelolaan aset daerah (Nurasih et al., 2025). Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah aparatur yang kompeten untuk menghasilkan pengelolaan aset yang lebih terstruktur dan efisien (Nursafitri et al., 2021). Selain itu, penelitian lain menambahkan bahwa SDM yang memiliki kesadaran dan keterampilan yang memadai dapat mengurangi kesalahan administratif dan memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan dengan akurat dan transparan (Awaludin et al., 2018). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM menjadi salah satu kunci utama dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD di pemerintahan daerah.

Komitmen pimpinan juga sangat menentukan karena pimpinan memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas, menyusun kebijakan, serta memastikan disiplin dalam pelaksanaan pengelolaan aset. Komitmen pimpinan yang kuat, berupa dukungan kebijakan yang jelas dan pengawasan yang ketat, berkontribusi besar dalam memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku (Siregar et al., 2023). Penelitian sebelumnya menambahkan bahwa pimpinan yang konsisten dalam implementasi kebijakan akan menciptakan budaya organisasi yang disiplin dan dapat diandalkan, serta mengarahkan aparatur untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab (Salsabila et al., 2023). Selain itu, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur dengan jelas bahwa pejabat pengguna barang dan kuasa pengguna barang memiliki peran besar dalam memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban BMD di setiap unit kerja. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, pengelolaan BMD dapat berjalan lebih terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di seluruh unit kerja di pemerintahan daerah. Seiring semakin rumitnya tuntutan pengelolaan aset, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan BMD.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan serta pemantauan asset (Annisa et al., 2022). Penggunaan sistem informasi terintegrasi, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan keterlacakan data aset daerah. Namun, efektivitas teknologi informasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM yang mengoperasikan sistem tersebut. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa meskipun teknologi informasi berpotensi mendukung pengelolaan yang lebih efisien, banyak daerah yang masih menghadapi kendala terkait infrastruktur digital yang belum optimal dan kurangnya pelatihan bagi pengguna *system* (Firmansyah, 2024). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif

memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kapasitas SDM untuk mengoperasikan sistem dengan baik (Ernawati et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan BMD tidak hanya sebatas kewajiban menyusun laporan, tetapi juga mencerminkan pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya yang dapat ditelusuri dan dievaluasi secara berkala. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, sementara komitmen pimpinan tidak berpengaruh secara parsial, meskipun keduanya secara bersama-sama tetap berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan aset (Sari et al., 2026). Temuan lain yang sejalan juga muncul pada penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian *intern* dapat memperkuat efektivitas pengelolaan aset sekaligus kualitas pelaporan (Wijaya et al., 2026). Namun, hasil temuan lain menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dalam pengelolaan aset pada pemerintah Sulawesi Selatan (Ulisanti et al., 2021). Selain itu, penelitian sebelumnya menempatkan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi yang mengindikasikan bahwa peran kepemimpinan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antar faktor dalam pengelolaan aset (Belo et al., 2018). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi, komitmen pimpinan, dan teknologi informasi sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan tata kelola setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BMD pada pemerintah Kota Bandung. penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literatur akuntansi sektor publik mengenai determinan tata kelola aset yang akuntabel. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandung dalam mengidentifikasi kelemahan penatausahaan aset serta merumuskan kebijakan penguatan kapasitas aparatur dan optimalisasi infrastruktur digital guna meningkatkan kualitas akuntabilitas publik.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengintegrasian tiga faktor kunci, yaitu kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi, dalam satu model analisis yang secara simultan mengkaji pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada konteks pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini tidak hanya menilai faktor administratif secara terpisah, tetapi menempatkannya dalam kerangka tata kelola aset daerah berbasis teknologi dan kepemimpinan, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan bersifat asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Penelitian dilakukan dengan teknik sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan responden. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan serta besaran pengaruh variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit organisasi yang menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Mengacu pada konsep populasi sebagai keseluruhan elemen yang

diobservasi (Sugiyono, 2018). Populasi penelitian ini mencakup 31 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan aset di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *sensus sampling*, yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel karena jumlah populasi yang terbatas (Krismananda et al, 2025). Dengan demikian, seluruh 62 responden yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan aset di 31 OPD tersebut dijadikan sampel untuk mewakili karakteristik populasi dalam penelitian ini.

*Tabel 1. Responden Penelitian Setiap OPD*

| <b>Nama Responden</b>  | <b>Variabel</b>                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengurus Barang di OPD | Kompetensi Sumber Daya Manusia<br>Komitmen Pimpinan<br>Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| Kepala OPD             | Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                                          |

### ***Definisi Operasional Variabel***

#### **Variabel Dependent (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD) didefinisikan sebagai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan BMD secara tertib, transparan, dan dapat ditelusuri pada seluruh tahapan pengelolaan aset; pengukurannya dilakukan melalui kuesioner dengan empat indikator, yaitu (1) akuntabilitas kejujuran dan hukum (kepatuhan pada peraturan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang), (2) akuntabilitas proses (kecukupan prosedur/administrasi serta dukungan sistem agar proses dapat diawasi), (3) akuntabilitas program (ketercapaian tujuan serta efektivitas–efisiensi pelaksanaan pengelolaan aset), dan (4) akuntabilitas kebijakan (pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan aset kepada pihak terkait, termasuk DPRD dan masyarakat, dari perencanaan hingga penghapusan).

#### **Variabel Independen (X1): Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia (X1) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan aparatur pengelola BMD dalam menjalankan tugas penatausahaan aset secara tepat, konsisten, dan profesional; pengukurannya dilakukan melalui kuesioner dengan tiga indikator utama, yaitu (1) pengetahuan (*knowledge*), yakni tingkat pemahaman aparatur terkait pekerjaan dan ketentuan pengelolaan aset, (2) keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan teknis/mental dalam melaksanakan pekerjaan penatausahaan aset yang dapat dibentuk melalui pelatihan, dan (3) sikap atau watak (*attitude/traits*), yaitu karakter dan konsistensi perilaku kerja aparatur dalam merespons situasi pekerjaan serta menjalankan tanggung jawabnya.

#### **Variabel Independen (X2): Komitmen Pimpinan**

Variabel komitmen pimpinan (X2) dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai tingkat kesungguhan pimpinan dalam mengarahkan, mendukung, dan memastikan kebijakan serta praktik pengelolaan BMD berjalan sesuai tujuan organisasi. Pengukurannya dilakukan menggunakan kuesioner dengan 7 indikator, yaitu *establish a policy*, *allocation of required resources*, *systematically monitor*, *find solutions to problem*, *actively participates*, *compensate/rewards*, dan *continuous improvement policy*.

#### **Variabel Independen (X3): Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauh mana teknologi informasi digunakan dan diintegrasikan dalam pelaksanaan aktivitas

pengelolaan BMD, khususnya untuk mendukung pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi aset secara lebih tertib. Pengukurannya dilakukan melalui kuesioner yang terdiri dari 8 butir pernyataan dan dikelompokkan ke dalam tiga dimensi/indikator, yaitu (1) perangkat, yang menggambarkan ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan; (2) pengelolaan data, yang menunjukkan penggunaan teknologi informasi dalam mengatur dan mengelola data aset secara terstruktur; serta (3) perawatan, yang mencerminkan adanya pemeliharaan rutin terhadap perangkat teknologi informasi agar operasional pengelolaan BMD berjalan lancar

## Hasil

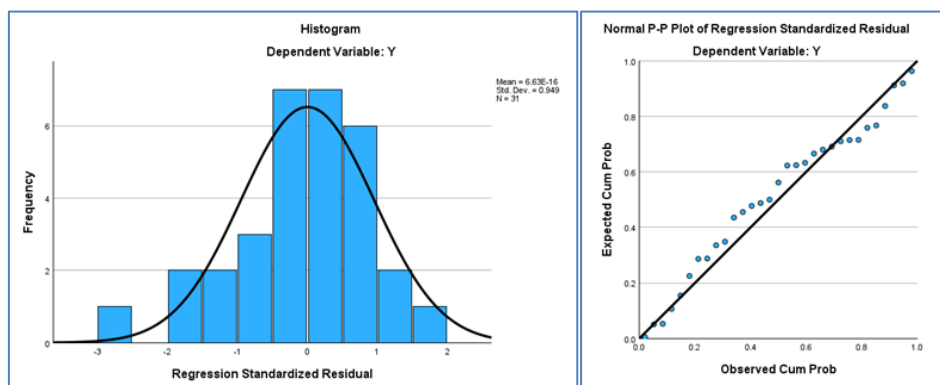
### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian dengan skala *Likert* 1–5 yang kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori penilaian berdasarkan rentang skor (interval 0,80). Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori baik hingga sangat baik. Variabel akuntabilitas pengelolaan BMD memperoleh skor tertinggi dengan rata-rata 4,49 (realisasi 89,7%) dan termasuk kategori sangat baik. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi memiliki rata-rata 4,25 (realisasi 85%) dan komitmen pimpinan rata-rata 4,24 (realisasi 84,8%), keduanya juga pada kategori sangat baik. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi variabel dengan skor terendah namun tetap berada pada kategori baik, dengan rata-rata 4,12 (realisasi 82,5%). Secara keseluruhan, rata-rata skor gabungan mencapai 4,28 (realisasi 85,5%) yang menunjukkan persepsi responden bahwa kondisi variabel penelitian tergolong sangat baik.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

| No             | Indikator                                     | Skor Riil | Skor Maks | Rata-Rata | % Realisasi | Kriteria    |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1.             | Kompetensi Sumber Daya Manusia                | 1023      | 1240      | 4,12      | 82,5%       | Baik        |
| 2.             | Komitmen Pimpinan                             | 920       | 1085      | 4,24      | 84,8%       | Sangat Baik |
| 3.             | Pemanfaatan Teknologi Informasi               | 1054      | 1240      | 4,25      | 85%         | Sangat Baik |
| 4.             | Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1530      | 1705      | 4,49      | 89,7%       | Sangat Baik |
| Skor Rata-Rata |                                               | 1131,7    | 1317,5    | 4,28      | 85,5%       | Sangat Baik |
| % GAP          |                                               |           |           | 0,72      | 14,5%       |             |
| Skor Maksimum  |                                               |           |           | 5,00      | 100%        |             |

### Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan melalui analisis grafik Histogram dan *Normal*

*probability plot* (P–P plot) menggunakan IBM SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa grafik histogram membentuk pola menyerupai lonceng (*bell-shaped*) yang simetris, serta titik-titik pada grafik Normal P–P plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Dengan demikian, residual dalam penelitian ini berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk pengujian selanjutnya

### **Hasil Uji Multikolinearitas**

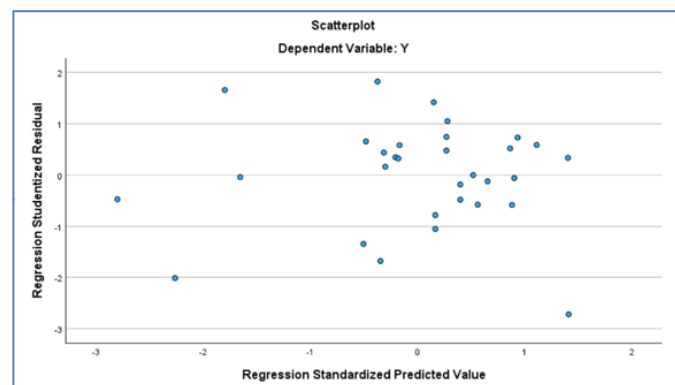
*Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas*

| <i>Model</i> | <i>Coefficients<sup>a</sup></i>    |                   |                                  |          | <i>Sig.</i> | <i>Collinearity Statistics</i> |            |
|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|------------|
|              | <i>Unstandardized Coefficients</i> |                   | <i>Standardized Coefficients</i> | <i>t</i> |             |                                |            |
|              | <i>B</i>                           | <i>Std. Error</i> | <i>Beta</i>                      |          |             | <i>Tolerance</i>               | <i>VIF</i> |
| (Constant)   | 20.014                             | 7.311             |                                  | 2.738    | .011        |                                |            |
| 1 X1         | .429                               | .186              | .367                             | 2.313    | .029        | .834                           | 1.199      |
| X2           | .651                               | .254              | .490                             | 2.560    | .016        | .573                           | 1.747      |
| X3           | -.122                              | .233              | -.099                            | -.521    | .607        | .582                           | 1.718      |

*a. Dependent variable: Y*

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance inflation factor* (VIF) pada masing-masing variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Tolerance* untuk X1 = 0,834, X2 = 0,573, dan X3 = 0,582 (seluruhnya > 0,10), serta nilai VIF untuk X1 = 1,199, X2 = 1,747, dan X3 = 1,718 (seluruhnya < 10). Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas yang signifikan dan semua variabel independen dapat diterima secara statistik untuk digunakan dalam model.

### **Uji Heteroskedastisitas**



*Gambar 2. Grafik Scatterplot Heteroskedastis*

Gambar 2 menampilkan grafik *scatterplot* uji heteroskedastisitas dengan sumbu horizontal menunjukkan *regression standardized predicted value* dan sumbu vertikal menunjukkan *regression studentized residual*. Titik-titik data terlihat menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut (*funnel*), gelombang, atau pola sistematis lainnya.

Sebaran titik yang relatif tidak teratur dan tidak membentuk pola khusus menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan pada berbagai nilai prediksi. Dengan demikian, berdasarkan grafik *scatterplot* tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam model regresi terpenuhi

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Pengujian regresi Linear Bergaba

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)              | 20.014                      | 7.311      |                           | 2.738 | .011 |
| X1                        | .429                        | .186       | .367                      | 2.313 | .029 |
| X2                        | .651                        | .254       | .490                      | 2.560 | .016 |
| X3                        | -.122                       | .233       | -.099                     | -.521 | .607 |

a. Dependent variable: Y

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan komitmen pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BMD dengan koefisien masing-masing sebesar 0,429 dan 0,651. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur dan komitmen pimpinan, maka akuntabilitas pengelolaan BMD akan semakin meningkat. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien sebesar -0,122, yang menunjukkan arah pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BMD. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia dan kepemimpinan lebih berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

## Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

| Model summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .658 <sup>a</sup> | .433     | .370              | 3.820                      |

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai  $R = 0,658$  yang mengindikasikan hubungan yang kuat antara variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan BMD. Nilai  $R^2 = 0,433$  berarti sekitar 43,3% variasi akuntabilitas pengelolaan BMD dapat dijelaskan oleh kompetensi sumber daya manusia (X1), komitmen pimpinan (X2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X3). Sementara itu, nilai  $Adjusted\ r\ square = 0,370$  menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, model mampu menjelaskan 37,0% variasi akuntabilitas, sedangkan sisanya 63,0% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi SDA terhadap Akuntabilitas Pengelolaan BMD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Koefisien regresi sebesar 0,429 mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD. Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik mampu melaksanakan penatausahaan aset secara lebih tertib, akurat, dan sesuai regulasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang menegaskan bahwa kualitas aparatur memengaruhi pengelolaan aset, serta temuan lain yang menemukan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap efektivitas manajemen aset daerah (Firmansyah et al., 2021; Fauziyyah et al., 2025). Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian lainnya bahwa

kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset sehingga prosesnya lebih terarah sesuai ketentuan (Harfianah et al., 2023). Aparatur yang kompeten mampu meminimalisasi kesalahan administratif, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta memastikan pengelolaan aset dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi regulasi, dan pengembangan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD di pemerintah daerah.

### ***Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,651. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen pimpinan, semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan BMD. Komitmen pimpinan tercermin dari dukungan dalam penyusunan kebijakan, alokasi sumber daya, pengawasan, serta keterlibatan aktif dalam penyelesaian permasalahan aset, sehingga mampu mendorong pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam mendorong pengelolaan aset yang lebih efektif, serta temuan lainnya yang menunjukkan bahwa komitmen pimpinan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi melalui dukungan dan alokasi sumber daya (Aulia et al., 2025). Selain itu, temuan terdahulu menegaskan bahwa komitmen pimpinan berperan dalam memastikan kualitas informasi akuntansi yang memadai yang pada akhirnya memengaruhi pengelolaan aset (Dharma et al., 2023). Perspektif ini juga sejalan dengan temuan terdahulu yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan yang kuat mendorong keterlibatan pimpinan dan memperkuat hubungan serta akuntabilitas organisasi (Tzempelikos, 2015). Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi cenderung mampu memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten serta memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMD tidak hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur, tetapi juga oleh komitmen pimpinan dalam mengarahkan dan mengawasi pengelolaan aset daerah.

### ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, dengan koefisien regresi sebesar -0,122. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD secara signifikan. Meskipun secara deskriptif pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik, keberadaannya lebih berperan sebagai sarana pendukung administratif dan belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Temuan tersebut sejalan dengan temuan terdahulu yang menekankan bahwa penggunaan sistem informasi aset dapat kurang berdampak ketika pemanfaatannya belum maksimal, pegawai belum cukup terlatih, atau terjadi perubahan sistem yang sering (Nursafitri et al., 2021). Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMD tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem teknologi informasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, komitmen pimpinan yang kuat, serta penerapan prosedur pengelolaan aset yang konsisten.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BMD, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas aparatur serta dukungan pimpinan berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang lebih akuntabel. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi belum memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BMD, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah. Keterbatasan penelitian ini perlu diperhatikan. Pertama, cakupan penelitian terbatas pada perangkat daerah di pemerintah Kota Bandung sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas ke pemerintah daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti sistem pengendalian internal, pengawasan, kualitas sistem informasi, dan budaya organisasi, sehingga model penelitian dapat menjelaskan fenomena secara lebih komprehensif.

## Acknowledgment

-

## Daftar Pustaka

- Annisa, H., Helmi, H., & Alqarni, W. (2022). Efektivitas penggunaan aplikasi simantab terhadap pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(2).
- Aulia, S., & Harnovinsah, J. M. V. (2025). Determinants of Regional Government Assets Report Quality With Leadership Commitment as a Moderator In State Educational Units Under The Jakarta Provincial Education Department. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 15(1), 1-10.  
<https://doi.org/10.26858/jiap.v15i1.70971>
- Awaludin, I., Suharman, H., & Fitriyah, F. K. (2018). Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pengelola Barang Milik Negara terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(2), 174-186.  
<https://doi.org/10.30871/jaat.v3i2.893>
- Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada opd di lingkungan pemerintah kabupaten Waropen dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 1-33. [https://doi.org/10.52062/JURNAL\\_AAA.V1I2.7](https://doi.org/10.52062/JURNAL_AAA.V1I2.7)
- Dharma, F., Metalia, M., & Sembiring, S. I. O. (2023). Factors Affecting Quality of Accounting Information and its impact on local government fixed assets management's effectiveness: A study on Local Government of Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 26(1), 49-84. <https://doi.org/10.33312/ijar.636>
- Ernawati, U., & Riyadi, S. (2022). The Effect Of Legal Audit, Asset Assessment, Human Resource Competence, And Leader Commitment On The Optimization Of Asset Utilization Regional Government Of East Barito Regency, Central Kalimantan Province. *Himalayan Journal Of Education And Literature*, 3(1), 01-13.  
<https://doi.org/10.47310/Hjel.2022.V03i01.048>

- Fauziyyah, Y., Sari, R. N., & Anggraini, L. (2025). Peran Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pada Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 221-245.  
<https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.23495>
- Firmansyah, A. (2024). Transformasi Pengelolaan Aset Daerah: Penguatan Pengendalian Internal dan Integrasi Teknologi untuk Optimalisasi BMD. *Jurnal Devis*, XV, 15.
- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi: Bagaimana kualitas pengelolaan barang milik negara di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(2), 177-193.  
<https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i2.1529>
- Harfianah, S., & Faisal, F. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2534-2549.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i10.p01>
- Krismananda, M. W., & Nurdiansyah, M. H. D. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Madrasah (Simas) Dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Administrasi Di Minu Pucang Sidoarjo. *Jurnal Tahsinia*, 6(12), 1917-1930.  
<https://doi.org/10.57171/mbgmcq12>
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Accountability*, 5(2).  
<https://doi.org/10.32400/ja.14427.5.2.2016.84%E2%80%919197>
- Lestariningsih, W. S. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 9(2), 119–133.  
<https://doi.org/10.30559/jpn.v9i2.500>
- Nurasih, S., & Sanusi, F. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. *Journal Social Society*, 5(2), 1501–1511.  
<https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.910>
- Nursafitri, R. E., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Maneksi*, 10(2), 177–185.  
<https://doi.org/10.31959/jm.v10i2.793>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. 11 (2018).  
<https://peraturan.bpk.go.id/details/139086/permendagri-no-11-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pub. L. 19 (2016).  
<https://peraturan.bpk.go.id/details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pub. L. 47 (2021).  
<https://peraturan.bpk.go.id/details/196220/permendagri-no-47-tahun-2021>

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. 17 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/details/134462/pp-no-17-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pub. L. 27 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/details/138973/pp-no-28-tahun-2020>
- Salsabila, A. R. S., & Ivan, Y. (2023). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Учредители: Universitas 45 Surabaya*, 2(1), 105-124. <https://doi.org/10.30640/Trending.V2i1.1916>
- Sari, T. K., Rocmawati, I., & Nugrahaningsih, N. (2026). Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. *Journal Social Society*, 6(1), 506–518. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1011>
- Siregar, M. M., & Nurbaiti, N. (2023). Analisis pengaruh kolaborasi SKPD, Kualitas SDM dan Komitmen kepemimpinan terhadap optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Bidang Aset dan Investasi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3939-3948. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3834>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Sutopo, Ed.; 1st Ed.). Alfabeta.
- Tzempelikos, N. (2015). Top management commitment and involvement and their link to key account management effectiveness. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 30(1), 32-44. <https://doi.org/10.1108/jbim-12-2012-0238>
- Ulisanti, L., & Asrori, A. (2021). Human Resource Competence as a Moderating Variable for the Quality of Local Government Financial Reports. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(2). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i2.1790>
- Wijaya, R. A., & Hamid, M. (2026). Pengaruh Teknologi blockchain dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UPT Logam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. *Journal Social Society*, 6(2), 971–983. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1186>